

PRAKTIK PATRONASE-KLIENTALISME MASYARAKAT LAUJE PEGUNUNGAN LOMBOK BARAT DI KECAMATAN TINOMBO PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2024

Puspita Rahma ^{1,*}; Sitti Chaeriah Ahsan ²; Sisrilnardi ³

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; puspitarahma73@gmail.com

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; chaeriah67@gmail.com

³ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; sisrilnardi13@gmail.com

*Correspondence : puspitarahma73@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Klientalisme; Masyarakat Lauje; Patronase; Pemilihan Legislatif 2024, Tinombo.*

Received : Juni 2026

Revised : Juni 2026

Accepted : Juli 2026

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik Patron-klientalisme yang terjadi pada masyarakat Lauje Pegunungan Lombok Barat, Kecamatan Tinombo, dalam Pemilihan Legislatif 2024. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena masih kuatnya ketergantungan sosial masyarakat terhadap elite lokal serta minimnya pendidikan politik yang mendorong terbentuknya hubungan Patron-klien dalam proses politik elektoral. Analisis penelitian ini menggunakan teori Patronase dan klientalisme Edward Aspinall yang menekankan peran *Brokerage* politik, modal sosial, dan partisipasi politik dalam mobilisasi dukungan elektoral. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilaksanakan di Pegunungan Lombok Barat, Kecamatan Tinombo, dengan melibatkan tujuh informan kunci yang dipilih secara *purposive*. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Patron-klientalisme berlangsung melalui hubungan asimetris antara Patron, yaitu elite politik atau calon legislatif, dan klien, yaitu masyarakat Lauje, yang diwujudkan dalam pertukaran dukungan politik dengan bantuan material berupa uang, barang, maupun janji pembangunan. Temuan juga memperlihatkan bahwa calon legislatif memanfaatkan jaringan sosial tradisional, tokoh adat, tokoh agama, serta elite lokal melalui peran Broker politik untuk memobilisasi suara masyarakat. Ketahanan relasi Patron-klien tersebut diperkuat oleh ikatan sosial, kedekatan emosional, dan harapan memperoleh manfaat ekonomi maupun pembangunan infrastruktur. Penelitian ini berkontribusi dalam menjelaskan bagaimana praktik Patron-klientalisme tetap bertahan dalam demokrasi lokal serta menunjukkan bahwa keberadaan *Brokerage* politik menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat pada tingkat lokal.

ABSTRACT:

This study aims to analyze the practice of Patron-clientelism among the Lauje community in the mountainous area of Lombok Barat, Tinombo District, during the 2024 Legislative Election. This phenomenon is important to examine due to the community's strong social dependence on local elites and the limited level of

political education, which encourages the formation of Patron-client relationships in electoral politics. The study applies Edward Aspinall's theory of Patronage and clientelism, emphasizing the roles of political Brokerage, social capital, and political participation in electoral mobilization. The research employed a qualitative method with a case study approach. The study was conducted in the mountainous area of Lombok Barat, Tinombo District, involving seven key informants selected through purposive sampling. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that Patron-client practices operate through an asymmetric relationship between Patrons, namely political elites or legislative candidates, and clients, namely the Lauje community, manifested in the exchange of political support for material benefits such as money, goods, and promises of development projects. The study also found that legislative candidates utilized traditional social networks, customary leaders, religious leaders, and local elites through political Brokers to mobilize voters. The persistence of Patron-client relations is reinforced by social ties, emotional closeness, and expectations of economic benefits and infrastructure development. This research contributes to understanding how Patron-clientelism continues to persist within local democratic processes and highlights the important role of political Brokerage in shaping local political behavior.

Pendahuluan

Demokrasi modern menempatkan pemilihan umum sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Menurut (Dwipayana, 2009), demokrasi merupakan metode institusional untuk menghasilkan keputusan politik melalui kompetisi antar Elit dalam memperoleh dukungan rakyat. Dalam perspektif ini, pemilu menjadi mekanisme utama bagi warga negara untuk menentukan pemimpin berdasarkan pilihan politik yang tersedia. Oleh karena itu, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh pelaksanaan pemilu yang bebas, kompetitif, dan terhindar dari praktik yang mendistorsi pilihan politik masyarakat.

Namun, demokrasi elektoral di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya praktik Patronase dan klientalisme. Hubungan Patron-klien tidak hanya melibatkan pertukaran sumber daya material dengan dukungan politik, tetapi juga memanfaatkan jaringan sosial, budaya, dan kekuasaan yang telah mengakar dalam masyarakat. Akibatnya, pilihan politik masyarakat sering kali dipengaruhi oleh hubungan ketergantungan sosial, bukan semata-mata pertimbangan rasional terhadap program dan kebijakan kandidat.

Kondisi tersebut tercermin dalam penurunan kualitas demokrasi Indonesia. Berdasarkan laporan *The Economist Intelligence Unit* tahun 2024, Indonesia memperoleh skor demokrasi 6,44 dan masuk kategori *flawed democracy*. Penurunan kualitas demokrasi ini kerap dikaitkan dengan maraknya politik uang melalui pemberian uang, barang, maupun insentif material lainnya untuk memengaruhi pilihan pemilih. Praktik tersebut tidak hanya mencederai prinsip pemilu yang jujur

dan adil, tetapi juga menurunkan kualitas representasi politik dan akuntabilitas pemerintahan (Yusuf *et al.*, 2024). Sejalan dengan itu, (Rohmah, Rahayu and Millata, 2024) menunjukkan bahwa tingginya biaya pemilu mendorong keterlibatan oligarki sebagai penyandang dana kandidat yang kemudian memperoleh posisi strategis sebagai imbalan politik. Praktik tersebut juga berkaitan dengan dinasti politik dan korupsi untuk kepentingan pribadi, partai, maupun pemilu. Dalam kondisi demikian, kompetisi politik cenderung bergeser dari kompetisi programatik menuju kompetisi berbasis modal ekonomi. Sementara itu, (Berenschot, 2018) menegaskan bahwa Klientelisme lebih mudah berkembang pada masyarakat yang memiliki ketergantungan ekonomi tinggi terhadap elite politik, sehingga distribusi manfaat personal menjadi lebih efektif dibandingkan tawaran kebijakan yang bersifat universal.

Fenomena Patronase dan klientalisme juga ditemukan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di wilayah pegunungan Kecamatan Tinombo. Masyarakat Lauje Pegunungan yang memiliki struktur sosial berbasis adat menunjukkan pola dukungan politik yang terkonsentrasi pada kandidat tertentu. Dalam komunitas ini terdapat figur adat seperti Olongian dan Kepala Nu Wada yang memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pilihan politik masyarakat. Mobilisasi politik tidak hanya dilakukan melalui bantuan material, tetapi juga melalui hubungan kekerabatan, kepatuhan adat, dan rasa hutang budi.

Secara empiris, masyarakat Lauje Pegunungan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan politik, informasi publik, dan pembangunan. Kondisi geografis yang terpencil menyebabkan hubungan masyarakat dengan aktor politik sering dimediasi oleh tokoh lokal yang memiliki legitimasi sosial kuat. Situasi ini membuka ruang bagi berkembangnya Patronase dan klientalisme. Dalam konteks tersebut, hubungan Patron-klien dibangun melalui pertukaran material, jaringan sosial, kedekatan personal, dan hubungan timbal balik yang berkelanjutan sehingga memperkuat loyalitas politik (Berenschot, 2018). Menurut (Higashijima and Washida, 2024), hubungan Patron-klien bersifat asimetris, di mana Patron menyediakan sumber daya, bantuan, dan perlindungan, sedangkan klien memberikan loyalitas dan dukungan politik sebagai balas jasa.

Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana praktik Patronase dan klientalisme terbentuk serta beroperasi dalam masyarakat Lauje Pegunungan pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024. Hubungan politik yang terjadi tidak hanya didasarkan pada pertukaran material antara kandidat dan pemilih, tetapi juga melibatkan tokoh adat sebagai perantara yang memiliki pengaruh sosial dan kultural yang kuat. Rendahnya literasi politik menyebabkan bantuan kandidat sering dipersepsikan sebagai kebaikan personal, bukan sebagai tanggung jawab negara. Akibatnya, muncul ketergantungan sosial yang mendorong dukungan politik sebagai bentuk balas jasa dan kewajiban moral, sehingga berpotensi mengurangi otonomi politik masyarakat dalam menentukan pilihan secara bebas dan rasional.

Kajian mengenai Patronase dan klientalisme telah banyak dilakukan di

Indonesia. Pertama, (Setiawan, 2022) menemukan bahwa hubungan Patron-klien antara calon legislatif dan masyarakat diwujudkan melalui pemberian pribadi, pelayanan sosial, serta pembelian suara yang didukung oleh budaya politik uang dan lemahnya pengawasan. Kedua, (Fathudin, Tharim and Ihya, 2020) menunjukkan bahwa pada masyarakat yang majemuk, legitimasi elite lokal dan jaringan identitas lebih efektif digunakan sebagai strategi politik dibandingkan modal finansial semata. Ketiga, (Andhika, 2017) mengungkapkan bahwa keberadaan dana desa mendorong munculnya Patronase dan Klientelisme dalam kontestasi politik desa yang berdampak pada konflik sosial, minimnya pendidikan politik, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada masyarakat perkotaan atau wilayah dengan akses politik yang relatif terbuka. Kajian mengenai Patronase dan klientalisme dalam masyarakat adat pedalaman, khususnya komunitas Lauje Pegunungan di Kecamatan Tinombo, masih terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji peran tokoh adat sebagai Broker politik yang menghubungkan kandidat dengan masyarakat melalui legitimasi budaya dan struktur sosial tradisional. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menjelaskan keterkaitan antara Patronase politik, peran Broker adat, dan karakteristik sosial-budaya masyarakat Lauje Pegunungan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik Patronase dan klientalisme pada masyarakat Lauje Pegunungan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk hubungan Patron-klien yang berkembang dalam masyarakat Lauje Pegunungan; (2) menganalisis peran Broker adat dalam menghubungkan kandidat dengan masyarakat pemilih; dan (3) menjelaskan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keberlangsungan praktik Patronase dan klientalisme dalam proses elektoral.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di masyarakat berdasarkan pengalaman, persepsi, dan pandangan para informan. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis praktik Patron-klientalisme yang terjadi pada masyarakat Lauje di Desa Lauje dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024, khususnya terkait hubungan antara Patron sebagai elite politik atau tokoh berpengaruh dengan klien sebagai masyarakat yang memberikan dukungan politik.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari empat orang, yaitu Kepala Desa Lauje, Tokoh Adat Desa Lauje, Tokoh Masyarakat Desa Lauje, dan masyarakat setempat. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan pengetahuan dan keterlibatan mereka terhadap fenomena yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk

memperoleh informasi mengenai bentuk, pola, dan faktor yang memengaruhi praktik Patron-klientalisme dalam pemilihan legislatif. Selain itu, data juga diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur, jurnal ilmiah, dokumen, dan peraturan yang relevan dengan fokus penelitian, serta dokumentasi berupa foto, catatan lapangan, dan dokumen pendukung lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bertugas mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik Patron-klientalisme pada masyarakat Lauje dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024 (Miles, Huberman and Saldana, 2014).

Hasil

1. Praktik Patronase dan Klientalisme dalam Pemilihan Legislatif 2024 pada Masyarakat Lauje Pegunungan

Praktik Patronase dan klientalisme masih menjadi pola hubungan politik yang dominan dalam Pemilihan Legislatif 2024 di masyarakat Lauje Pegunungan. Relasi tersebut terbangun melalui hubungan timbal balik antara calon legislatif sebagai Patron yang memiliki akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi dengan masyarakat sebagai klien yang memberikan dukungan politik dalam bentuk suara.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa praktik Patronase tidak lebih banyak diwujudkan melalui pemberian sembako atau uang tunai secara langsung, melainkan melalui janji pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial yang dijanjikan setelah calon terpilih. Janji pembangunan rumah, perbaikan fasilitas umum, dan pembangunan infrastruktur desa menjadi instrumen utama yang digunakan untuk memperoleh dukungan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan pembangunan di wilayah pegunungan dimanfaatkan sebagai sarana mobilisasi politik sehingga bantuan publik dipersepsikan sebagai hasil hubungan personal dengan kandidat, bukan sebagai hak warga negara.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa mobilisasi dukungan politik dilakukan melalui jaringan sosial yang telah memiliki legitimasi kuat di masyarakat, terutama lembaga adat, tokoh adat, dan tokoh agama. Aktor politik cenderung tidak berinteraksi langsung dengan seluruh pemilih, melainkan memanfaatkan figur-figur yang dihormati untuk menyampaikan pesan politik dan mengonsolidasikan dukungan. Dalam praktiknya, tokoh-tokoh tersebut berfungsi sebagai Broker politik yang menjembatani hubungan antara calon legislatif dengan masyarakat pemilih.

Kuatnya pengaruh tokoh adat dan tokoh agama menyebabkan proses pengambilan keputusan politik masyarakat cenderung bersifat kolektif. Pilihan politik masyarakat tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan program, visi, dan kompetensi kandidat, tetapi dipengaruhi oleh arahan dan rekomendasi dari figur-figur yang memiliki otoritas sosial dan budaya. Kepercayaan yang tinggi terhadap

tokoh lokal mendorong masyarakat menyerahkan sebagian keputusan politik kepada mereka, sehingga terbentuk pola hubungan yang memperkuat praktik klientalisme.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan politik dan keterbatasan akses informasi menjadi faktor yang memperkuat keberlangsungan praktik Patronase dan klientalisme. Dalam kondisi tersebut, masyarakat lebih mudah menerima arahan politik dari tokoh yang dipercaya dibandingkan melakukan penilaian secara mandiri terhadap kandidat yang bersaing. Situasi ini menciptakan hubungan ketergantungan antara masyarakat dengan elite lokal yang memiliki akses terhadap sumber daya maupun jaringan kekuasaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep hubungan Patron-klien yang dikemukakan oleh (Pellicer *et al.*, 2022), hubungan Patron-klien dibangun atas dasar pertukaran timbal balik, di mana Patron memberikan berbagai manfaat atau sumber daya kepada klien, sedangkan klien membalasnya melalui dukungan politik, termasuk pemberian suara, partisipasi kampanye, maupun loyalitas politik. Temuan ini juga memperkuat teori *Brokerage* yang dikembangkan oleh *Aspinall*, yang menjelaskan bahwa keberhasilan mobilisasi dukungan politik di tingkat lokal sangat bergantung pada keberadaan perantara atau Broker yang memiliki pengaruh sosial di tengah masyarakat.

Dengan demikian, praktik Patronase dan klientalisme dalam Pemilihan Legislatif 2024 di masyarakat Lauje Pegunungan tidak hanya berbentuk pertukaran material secara langsung, tetapi juga diwujudkan melalui janji pembangunan, pemanfaatan jaringan adat dan agama, serta mobilisasi politik oleh tokoh-tokoh lokal yang memiliki legitimasi sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa dukungan politik masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh hubungan personal, kepercayaan sosial, dan ketergantungan terhadap elite lokal dibandingkan pertimbangan rasional terhadap program politik yang ditawarkan kandidat.

2. Indikator Broker yang Mempengaruhi Praktik Patronase dan Klientalisme

Keberadaan Broker memiliki peran penting dalam memengaruhi praktik Patronase dan klientalisme pada Pemilihan Legislatif 2024 di masyarakat Lauje Pegunungan. Dalam konteks ini, Broker tidak hanya berfungsi sebagai perantara antara calon legislatif dan masyarakat pemilih, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki kemampuan membangun kepercayaan, menyebarkan informasi politik, serta memobilisasi dukungan melalui jaringan sosial yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat cenderung memperoleh informasi mengenai kandidat melalui tokoh adat, tokoh agama, dan figur-figur yang memiliki kedudukan sosial tinggi dalam komunitas. Keberadaan tokoh-tokoh tersebut menjadi penting karena masyarakat masih menempatkan mereka sebagai sumber rujukan dalam berbagai persoalan sosial, termasuk dalam menentukan pilihan politik. Akibatnya, proses pengambilan keputusan politik tidak sepenuhnya dilakukan secara individual, tetapi sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan dan penjelasan yang

diberikan oleh tokoh yang dipercaya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaruh Broker lebih banyak bekerja melalui mekanisme sosial dan budaya dibandingkan melalui instrumen material. Tokoh adat dan tokoh masyarakat tidak secara langsung mengarahkan pilihan politik warga, namun berperan dalam menjelaskan informasi mengenai kandidat, memberikan pemahaman terhadap pilihan yang tersedia, serta menjadi sumber legitimasi bagi kandidat tertentu. Dalam kondisi demikian, masyarakat cenderung menjadikan pandangan tokoh yang dihormati sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik.

Selain itu, kuatnya hubungan kekerabatan dan struktur sosial tradisional menyebabkan peran Broker semakin efektif dalam membangun hubungan antara kandidat dan masyarakat. Kandidat tidak harus menjangkau seluruh pemilih secara langsung, melainkan cukup membangun komunikasi dengan sejumlah figur yang memiliki pengaruh sosial di tingkat lokal. Melalui jaringan tersebut, informasi politik dapat disebarkan secara lebih luas dan diterima oleh masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik Patronase dan klientalisme di masyarakat Lauje Pegunungan memiliki karakter yang bersifat relasional dan kultural. Hubungan antara kandidat dan pemilih tidak hanya dibangun melalui pertukaran sumber daya, tetapi juga melalui jaringan kepercayaan yang terbentuk dalam sistem adat dan kekeluargaan. Dalam struktur tersebut, Broker menempati posisi strategis sebagai penghubung yang menjembatani kepentingan politik kandidat dengan preferensi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa indikator utama yang menunjukkan kuatnya peran Broker dalam praktik Patronase dan klientalisme. Pertama, adanya legitimasi sosial yang bersumber dari kedudukan adat dan hubungan kekeluargaan. Kedua, kepemilikan otoritas moral yang diakui oleh masyarakat sehingga pendapat dan penjelasannya dipercaya. Ketiga, kapasitas informatif dalam menyampaikan dan menjelaskan profil kandidat kepada masyarakat. Keempat, posisi strategis dalam struktur sosial yang memungkinkan mereka menjadi penghubung antara kandidat dengan pemilih.

Dengan demikian, praktik Patronase dan klientalisme dalam Pemilihan Legislatif 2024 di masyarakat Lauje Pegunungan tidak dapat dilepaskan dari peran Broker yang tertanam dalam struktur sosial lokal. Demokrasi elektoral secara prosedural telah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya, namun dalam praktiknya proses tersebut masih dimediasi oleh hubungan sosial, jaringan kepercayaan, serta pengaruh tokoh-tokoh lokal yang memiliki legitimasi kuat di tengah masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan preferensi politik di tingkat akar rumput masih sangat dipengaruhi oleh keberadaan Broker sebagai penghubung utama dalam relasi Patronase dan klientalisme.

3. Dampak Praktik Patronase-Klientelisme terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Lauje Pegunungan

Praktik Patronase-Klientelisme memberikan dampak yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat Lauje Pegunungan dalam Pemilihan Legislatif 2024. Dampak tersebut terlihat dari perubahan pola partisipasi politik masyarakat yang tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan program, visi, dan kapasitas kandidat, melainkan dipengaruhi oleh hubungan timbal balik antara kandidat dengan masyarakat melalui pemberian bantuan, janji pembangunan, serta kedekatan sosial yang dibangun selama proses pemilihan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pendekatan yang paling dominan digunakan oleh calon legislatif dalam memperoleh dukungan masyarakat adalah pemberian bantuan dan penyampaian janji politik. Bantuan yang diberikan tidak hanya dipahami sebagai bentuk kepedulian sosial, tetapi juga membangun harapan serta ikatan moral yang mendorong masyarakat untuk memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara kandidat dan pemilih cenderung berkembang ke arah hubungan pertukaran yang bersifat transaksional.

Penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi politik masyarakat mengalami peningkatan secara kuantitatif karena adanya mobilisasi yang dilakukan melalui jaringan sosial lokal. Kehadiran masyarakat dalam berbagai kegiatan politik, termasuk pertemuan komunitas dan pemungutan suara, relatif tinggi karena adanya keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berperan sebagai penghubung antara kandidat dan warga. Melalui jaringan tersebut, informasi politik lebih mudah disebarluaskan dan dukungan masyarakat dapat dikonsolidasikan secara efektif.

Namun demikian, tingginya tingkat partisipasi tersebut tidak selalu mencerminkan kualitas partisipasi politik yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih cenderung mengikuti arahan atau rekomendasi dari tokoh yang dihormati dibandingkan melakukan penilaian secara mandiri terhadap program dan kapasitas kandidat. Akibatnya, proses pengambilan keputusan politik lebih banyak dipengaruhi oleh hubungan sosial dan loyalitas kelompok daripada pertimbangan rasional yang berorientasi pada kepentingan publik.

Selain itu, pemanfaatan lembaga adat sebagai ruang komunikasi politik memberikan dampak ganda terhadap partisipasi masyarakat. Di satu sisi, keberadaan lembaga adat mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik melalui pendekatan yang sesuai dengan nilai dan budaya lokal. Di sisi lain, dominasi tokoh-tokoh tertentu dalam penyampaian informasi politik berpotensi memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap figur yang memiliki otoritas sosial, sehingga ruang bagi partisipasi politik yang kritis dan independen menjadi terbatas.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa praktik Patronase-Klientelisme memperkuat hubungan loyalitas antara masyarakat dengan kandidat maupun elite lokal. Loyalitas tersebut tidak hanya dibangun melalui pemberian bantuan material,

tetapi juga melalui jaringan kepercayaan yang telah berkembang dalam struktur sosial masyarakat. Akibatnya, pilihan politik masyarakat sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan hubungan personal dan rasa kewajiban moral untuk membalas bantuan yang telah diterima.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Patronase-Klientelisme di masyarakat Lauje Pegunungan berdampak pada terbentuknya pola partisipasi politik yang cenderung bersifat transaksional. Meskipun partisipasi masyarakat dalam pemilu relatif tinggi, kualitas partisipasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi politik yang otonom dan kritis. Pilihan politik masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh hubungan Patron-klien, jaringan sosial lokal, serta peran Broker yang menjembatani kepentingan kandidat dengan masyarakat pemilih.

Dengan demikian, praktik Patronase-Klientelisme tidak hanya memengaruhi perilaku memilih masyarakat, tetapi juga membentuk pola partisipasi politik yang berorientasi pada loyalitas sosial dan pertukaran manfaat. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di masyarakat Lauje Pegunungan secara prosedural berjalan dengan baik, namun secara substantif masih menghadapi tantangan berupa kuatnya pengaruh hubungan Patron-klien dan politik transaksional dalam proses pembentukan preferensi politik masyarakat.

Pembahasan

1. Dinamika Relasi Patron-Klien dan Mobilisasi Politik dalam Pemilihan Legislatif 2024

Berdasarkan temuan penelitian, praktik Patronase dan klientalisme dalam Pemilihan Legislatif 2024 di masyarakat Lauje Pegunungan menunjukkan bahwa hubungan politik yang terbentuk tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan programatik, melainkan pada pertukaran dukungan politik dengan harapan memperoleh manfaat tertentu di masa mendatang. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Gina, Yunus and Sisrilnardi, 2025) mengenai praktik *vote buying* dalam fenomena mudik pemilu pada Pemilihan Legislatif 2024 di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Donggala. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa mobilisasi pemilih dilakukan melalui pemberian bantuan material maupun non-material dengan memanfaatkan jaringan keluarga, teman sebaya, dan tim sukses sebagai perantara antara calon legislatif dan pemilih. Dalam masyarakat Lauje Pegunungan, calon legislatif berperan sebagai Patron yang menawarkan bantuan dan janji pembangunan, sedangkan masyarakat berperan sebagai klien yang memberikan dukungan politik sebagai bentuk balas jasa.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik Patronase lebih banyak diwujudkan melalui janji pembangunan dibandingkan pemberian bantuan langsung. Salah satu informan menyatakan, *"kalau untuk sembako kayanya tidak ada kebanyakan itu misalnya ada bantuan akan ada bantuan rumah kalau misalnya caleg terpilih kaya ada infrastruktur."* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kandidat lebih banyak

membangun ekspektasi jangka panjang melalui janji pembangunan infrastruktur dan bantuan perumahan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat dimanfaatkan sebagai sarana memperoleh dukungan elektoral. Janji pembangunan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara kemudian dipersonalisasi sebagai komitmen individu calon legislatif, sehingga memperkuat hubungan ketergantungan antara masyarakat dan kandidat.

Praktik klientalisme juga diperkuat oleh keberadaan tokoh adat sebagai Broker politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mobilisasi dukungan dilakukan melalui jaringan sosial yang telah mengakar dalam struktur masyarakat. Hal ini terlihat dari pernyataan informan yang menyebutkan, *“melakukan pertemuan komunitas misalnya lewat fasilitas adat atau tokoh-tokoh lain, fokus di adat, pengaruh menyampaikan itu melalui lembaga adat.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai institusi budaya, tetapi juga menjadi saluran penting dalam penyebaran pesan politik. Dalam perspektif teori (Aspinall, 2014), tokoh adat berperan sebagai penghubung antara kandidat dan pemilih. Keberadaan mereka memberikan legitimasi sosial kepada kandidat sekaligus mempermudah mobilisasi dukungan secara kolektif. Dengan demikian, keberhasilan kandidat tidak hanya ditentukan oleh kapasitas finansial, tetapi juga oleh kemampuannya membangun kedekatan dengan aktor lokal yang memiliki pengaruh sosial kuat.

Lebih lanjut, dominasi tokoh adat dan tokoh agama menunjukkan bahwa pengambilan keputusan politik masyarakat masih dipengaruhi oleh hubungan sosial tradisional. Salah satu informan menjelaskan, *“tipikal masyarakat kitorang didesa ini yang pertama masih melatar belakangi SDM yang kurang secara otomatis apapun yang menjadi urusan nya dorang permasalahan yang dorang itu masih dorang serahkan.”* Pernyataan ini menggambarkan bahwa sebagian masyarakat cenderung menyerahkan berbagai urusan, termasuk pilihan politik, kepada figur yang dianggap memiliki otoritas dan pengetahuan lebih tinggi. Rendahnya pendidikan politik menyebabkan masyarakat lebih mengandalkan arahan tokoh yang dihormati daripada mengevaluasi secara mandiri visi, misi, dan program kandidat. Akibatnya, partisipasi politik yang terbentuk lebih bersifat kolektif daripada individual dan rasional.

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian (rahmayanti, Pageno and Pradana, 2025) yang menemukan adanya praktik *club goods* berupa janji maupun penyediaan fasilitas publik dan pembangunan infrastruktur desa untuk memperoleh dukungan politik masyarakat. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sering kali tidak hanya diposisikan sebagai program pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen mobilisasi politik dalam kontestasi elektoral. Selain itu, penelitian (Renaldi, Hartawan and Pradana, 2025) menunjukkan bahwa perilaku pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif 2024 di Kecamatan Sojol Utara dipengaruhi oleh faktor sosiologis, psikologis, dan rasional, dengan faktor sosiologis sebagai faktor yang paling dominan. Temuan tersebut sejalan dengan kondisi masyarakat Lauje Pegunungan yang masih dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, ikatan komunal, serta otoritas tokoh adat dan tokoh agama dalam

menentukan pilihan politik. Kedekatan sosial yang kuat menyebabkan masyarakat lebih mempercayai arahan tokoh yang dihormati dibandingkan melakukan penilaian secara mandiri terhadap program dan kapasitas calon legislatif.

Dengan demikian, praktik Patronase dan klientalisme dalam Pemilihan Legislatif 2024 di masyarakat Lauje Pegunungan tidak hanya berlangsung melalui pertukaran materi dan dukungan politik, tetapi juga melalui pemanfaatan struktur sosial tradisional yang masih kuat. Relasi Patron-klien dibangun melalui kombinasi janji pembangunan, pengaruh tokoh adat dan tokoh agama, serta mekanisme mobilisasi politik yang memanfaatkan jaringan sosial masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Patronase dan klientalisme telah melekat dalam struktur sosial lokal yang memungkinkan aktor politik memperoleh dukungan melalui hubungan ketergantungan, loyalitas, dan kepercayaan yang telah terbentuk dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

2. Peran Broker dalam Memediasi Relasi Patron-Klien pada Pemilihan Legislatif 2024

Berdasarkan temuan penelitian, keberadaan broker dalam Pemilihan Legislatif 2024 pada masyarakat Lauje Pegunungan menunjukkan bahwa praktik Patronase dan klientalisme tidak hanya ditentukan oleh hubungan langsung antara kandidat dan pemilih, tetapi juga oleh aktor perantara yang memiliki legitimasi sosial di tengah masyarakat. Broker berperan sebagai penghubung antara kepentingan kandidat dan kebutuhan informasi masyarakat. Pengaruh mereka tidak hanya berasal dari kemampuan mendistribusikan sumber daya politik, tetapi juga dari tingkat kepercayaan yang diberikan masyarakat. Oleh karena itu, Broker menjadi komponen penting dalam memperkuat hubungan Patron-klien di tingkat lokal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih menjadikan tokoh adat dan tokoh masyarakat sebagai rujukan utama dalam memperoleh informasi politik. Sebagaimana diungkapkan oleh informan, *"para warga-warga ini kebanyakan dia hanya tanya lewat adat atau lewat tokoh-tokoh, jadi pengaruh tokoh-tokoh dan lembaga adat ini bisa jadi dibilang pengaruh itu dalam proses pemilihan yang jelas masih."* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pilihan politik masyarakat tidak sepenuhnya dibentuk melalui akses informasi yang diperoleh secara mandiri, melainkan melalui konsultasi dengan figur yang memiliki otoritas sosial. Dalam perspektif teori (Aspinall, 2014), Broker memiliki posisi strategis karena mampu menghubungkan elite politik dengan pemilih melalui jaringan sosial yang telah terbangun. Kepercayaan masyarakat kepada broker menjadi modal sosial yang berpengaruh dalam pembentukan preferensi politik.

Selain sebagai penyampai informasi, broker juga memperoleh pengaruh melalui legitimasi moral yang dimilikinya. Hal ini terlihat dari pernyataan informan, *"kalau dia kepala adat dia pasti berpengaruh toh karena dia dianggap tokoh yang bisa mengatur masyarakat."* Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh broker tidak selalu berasal dari jabatan politik formal, melainkan dari pengakuan sosial terhadap posisi

dan kewibawaannya. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Lamohamad, Pageno and Sisrilnardi, 2024) yang menunjukkan bahwa preferensi politik Generasi Z pada Pemilu 2024 di Kabupaten Parigi Moutong lebih dipengaruhi oleh isu dan kebijakan kandidat dibandingkan citra kandidat semata. Hal tersebut menegaskan pentingnya informasi politik dalam membentuk pilihan elektoral. Dalam masyarakat Lauje Pegunungan, informasi mengenai kandidat, visi, misi, dan program pembangunan sering kali diperoleh melalui tokoh adat dan tokoh masyarakat yang berperan sebagai broker. Dengan demikian, fungsi informatif broker menjadi strategis karena membantu masyarakat memahami kandidat sekaligus membentuk persepsi politik mereka.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa broker menjalankan fungsi yang lebih bersifat persuasif dan informatif daripada koersif. Sebagaimana dijelaskan oleh informan, *"kapasitasnya hanya dalam menjelaskan misalnya ada tokoh atau paslon atau calon legislatif."* Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa broker berperan sebagai fasilitator informasi yang membantu masyarakat mengenali kandidat dan memahami kontestasi politik. Meskipun tidak secara langsung mengarahkan pilihan politik, posisi mereka sebagai sumber informasi yang dipercaya tetap memberikan pengaruh signifikan terhadap pembentukan persepsi dan preferensi politik masyarakat, terutama dalam kondisi keterbatasan akses informasi.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian (Nurhikma, Nawawi and Sisrilnardi, 2024) yang menunjukkan bahwa modal sosial, jaringan kekeluargaan, dan kedekatan dengan elite lokal menjadi faktor penting dalam membentuk dukungan politik masyarakat. Pada masyarakat Lauje Pegunungan, kondisi tersebut terlihat melalui peran tokoh adat dan tokoh masyarakat yang menjadi rujukan utama dalam memperoleh informasi politik dan menentukan sikap elektoral. Dengan demikian, pengaruh Broker tidak hanya lahir dari kemampuannya menyampaikan informasi politik, tetapi juga dari legitimasi sosial yang melekat pada posisinya dalam struktur masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis, keberhasilan Broker dalam memengaruhi praktik Patronase dan klientalisme ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu legitimasi sosial berbasis adat dan kekeluargaan, otoritas moral yang diakui masyarakat, kapasitas informatif dalam menjelaskan kandidat, serta posisi strategis dalam struktur sosial lokal. Keempat faktor tersebut menjadikan Broker sebagai aktor yang mampu membangun kepercayaan sekaligus menjembatani kepentingan politik kandidat dengan masyarakat. Dengan demikian, praktik Patronase dan klientalisme di masyarakat Lauje Pegunungan tidak hanya berlangsung melalui pertukaran sumber daya politik, tetapi juga melalui mekanisme sosial yang memanfaatkan kepercayaan, penghormatan, dan kedekatan kultural yang telah lama terbangun dalam kehidupan masyarakat setempat.

3. Dampak Praktik Patronase-Klientelisme terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Lauje Pegunungan

Berdasarkan temuan penelitian, praktik Patronase dan Klientelisme dalam Pemilihan Legislatif 2024 telah memengaruhi pola partisipasi politik masyarakat Lauje Pegunungan. Partisipasi politik yang idealnya didasarkan pada pertimbangan

rasional terhadap visi, misi, dan program kandidat cenderung bergeser menjadi partisipasi yang dipengaruhi oleh hubungan timbal balik antara kandidat dan pemilih. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses politik tidak sepenuhnya didorong oleh kesadaran politik yang kritis, melainkan oleh harapan memperoleh manfaat tertentu dari hubungan yang terjalin dengan aktor politik maupun perantara lokal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa bantuan dan janji politik menjadi instrumen utama dalam membangun dukungan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh informan bahwa *“yang kebanyakan kalau kitorang mungkin lebih dominan bantuan dan janji setelah dia kasih bantuan dan dia janji.”* Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara kandidat dan masyarakat dibangun melalui mekanisme pertukaran yang bersifat transaksional. Bantuan yang diberikan sebelum pemilihan menciptakan ikatan moral yang mendorong masyarakat untuk membalasnya melalui dukungan politik. Dalam perspektif Patron-klien, kondisi ini menunjukkan adanya hubungan *reciprocity* yang tidak seimbang, di mana pemilih merasa memiliki kewajiban moral untuk mendukung kandidat yang telah memberikan bantuan. Akibatnya, orientasi pemilih tidak lagi sepenuhnya berfokus pada kualitas program dan kapasitas kandidat, melainkan pada manfaat yang diterima secara langsung.

Selain dipengaruhi oleh bantuan material, partisipasi politik masyarakat juga dibentuk melalui mekanisme sosial yang melibatkan lembaga adat dan tokoh masyarakat. Hal ini terlihat dari pernyataan informan yang menyebutkan bahwa *“disini kita melakukan pertemuan komunitas dengan calon anggota legislatif misalnya lewat fasilitas adat atau tokoh-tokoh lain.”* Temuan tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat masih memiliki posisi penting sebagai ruang komunikasi politik antara kandidat dan masyarakat. Keberadaan lembaga adat tidak hanya memfasilitasi penyampaian informasi politik, tetapi juga memperkuat legitimasi kandidat di hadapan masyarakat. Dalam kerangka teori (Aspinall, 2014), tokoh adat berfungsi sebagai Broker yang menjembatani hubungan antara elite politik dan pemilih. Melalui jaringan sosial yang telah terbentuk, mereka mampu memobilisasi partisipasi masyarakat secara lebih efektif dibandingkan pendekatan politik yang bersifat individual. Namun, kondisi ini juga berpotensi mengurangi independensi pemilih karena preferensi politik sering kali terbentuk melalui pengaruh kolektif yang berasal dari figur yang dihormati.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh struktur sosial dan budaya yang berkembang dalam komunitas. Pertemuan politik yang dilakukan melalui lembaga adat menciptakan ruang kolektif yang memperkuat solidaritas kelompok, tetapi pada saat yang sama dapat membatasi munculnya pilihan politik yang benar-benar mandiri. Ketika tokoh adat atau tokoh masyarakat menjadi sumber utama informasi politik, masyarakat cenderung mengikuti arah preferensi yang berkembang dalam komunitas dibandingkan melakukan evaluasi secara individual terhadap kandidat yang berkontestasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Higashijima and Washida, 2024) yang menunjukkan bahwa hubungan patron-klien dalam konteks politik elektoral tidak hanya didasarkan pada pertukaran material, tetapi juga pada hubungan jangka panjang yang bersifat relasional, di mana kepercayaan, kedekatan sosial, dan loyalitas politik memainkan peran penting dalam menentukan perilaku memilih masyarakat. Selain itu, penelitian (Fossati, 2018) menemukan bahwa pengaruh tokoh lokal dan identitas komunal sering kali lebih efektif dalam memobilisasi dukungan politik dibandingkan strategi politik uang semata, karena pemilih di tingkat lokal cenderung mempertimbangkan kedekatan sosial, legitimasi tokoh, serta ikatan identitas dalam menentukan pilihan politik mereka. Temuan ini juga didukung oleh penelitian (Sufianto, Subagyo and Kurnia, 2018) yang menjelaskan bahwa dalam konteks pemilihan umum di tingkat lokal, patronase tidak hanya diwujudkan melalui distribusi sumber daya, tetapi juga melalui relasi sosial yang berkelanjutan antara aktor politik dan masyarakat. Relasi ini membentuk loyalitas politik dan memperkuat ketergantungan sosial yang memengaruhi perilaku memilih masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis, praktik Patronase dan Klientelisme di masyarakat Lauje Pegunungan menghasilkan dampak yang bersifat paradoksial terhadap partisipasi politik. Di satu sisi, praktik tersebut mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan karena adanya mobilisasi yang dilakukan melalui bantuan, janji politik, serta jaringan sosial yang kuat. Namun, di sisi lain, kualitas partisipasi politik mengalami penurunan karena keputusan politik masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh hubungan ketergantungan dan loyalitas dibandingkan pertimbangan rasional terhadap program kandidat. Dengan demikian, tingginya tingkat partisipasi politik secara kuantitatif tidak selalu mencerminkan kuatnya demokrasi substantif. Dalam konteks masyarakat Lauje Pegunungan, partisipasi politik yang terbentuk cenderung merupakan hasil dari interaksi antara kebutuhan ekonomi, pengaruh tokoh lokal, dan jaringan Patronase yang telah mengakar dalam struktur sosial masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti praktik Patronase dan Klientelisme dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di masyarakat Lauje Pegunungan, Kecamatan Tinombo, dengan memberikan pemahaman bahwa hubungan politik tidak hanya dibangun melalui pertukaran material, tetapi juga melalui jaringan sosial, kedekatan kultural, serta peran tokoh adat sebagai Broker politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Patronase dan Klientelisme terbentuk melalui relasi timbal balik antara kandidat, tokoh adat, dan masyarakat, di mana distribusi sumber daya politik dipertukarkan dengan dukungan serta loyalitas politik yang diperkuat oleh legitimasi sosial-budaya. Temuan ini juga menunjukkan bahwa keterbatasan akses pendidikan politik, kondisi geografis yang terpencil, serta ketergantungan ekonomi terhadap elite lokal memperkuat pola hubungan personal dalam perilaku memilih masyarakat. Dengan demikian, orientasi politik masyarakat cenderung bergeser dari pertimbangan

programatik menuju hubungan personal dan kewajiban moral dalam struktur sosial adat, sehingga Patronase dan Klientelisme tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme elektoral, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang mengatur relasi kekuasaan lokal dan membatasi otonomi politik masyarakat dalam menentukan pilihan secara rasional. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan literasi politik dan pengawasan praktik politik di tingkat lokal, sementara penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut peran *Brokerage* adat serta melakukan perbandingan dengan komunitas adat lain guna memperluas kajian tentang politik berbasis patronase di wilayah pedalaman Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sitti Chaeriah Ahsan dan Bapak Sisrilnardi atas segala bimbingan, arahan, serta dukungan yang telah diberikan selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini. Berbagai masukan, saran, dan motivasi yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung kelancaran proses penelitian dan publikasi karya ilmiah ini.

Referensi

- Andhika, L.R. (2017) 'BAHAYA PATRONASE DAN KLIENTELISME DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK', *Universitas Padjadjaran*, 22(3), pp. 205–219.
- Aspinall, E. (2014) 'WHEN BROKERS BETRAY: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia', *Critical Asian Studies*, 46(4), pp. 545–570. Available at: <https://doi.org/10.1080/14672715.2014.960706>.
- Berenschot, W. (2018) 'The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia's Patronage Democracy', *Comparative Political Studies*, 51(12), pp. 1563–1593. Available at: <https://doi.org/10.1177/0010414018758756>.
- Dwipayana, Aagna. (2009) 'DEMOKRASI BIAYA TINGGI Dimensi Ekonomi dalam Proses Demokrasi Elektoral di Indonesia Pasca Orde Baru', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12(3), pp. 257–390.
- Fathudin, Tharim, A. and Ihya, N.H. (2020) *PATRONASE, KLIENTELISME DAN POLITIK IDENTITAS DALAM PERHELATAN DEMOKRASI AKAR RUMPUT*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH.
- Fossati, D. (2018) 'A Tale of Three Cities: Electoral Accountability in Indonesian Local Politics', *Journal of Contemporary Asia*, 48(1), pp. 23–49. Available at: <https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1376345>.
- Gina, Yunus and Sisrilnardi (2025) 'PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024 DAPIL 4

- Higashijima, M. and Washida, H. (2024) 'Varieties of clientelism across political parties: new measures of patron–client relationships', *European Political Science Review*, 16(2), pp. 260–280. Available at: <https://doi.org/10.1017/S1755773923000309>.
- Lamohamad, F.M., Pageno, I. and Sisrilnardi (2024) 'Pengaruh Citra Dan Isu Kebijakan Politik Kandidat Capres- Cawapres Tahun 2024 Terhadap Perilaku Memilih Generasi Z Di Kabupaten Parigi Moutong', *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(3), pp. 27–40.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldana, J. (2014) *Qualitative Data Analysis*. Cet 3. Los Angeles: SAGE.
- Nurhikma, Nawawi, M. and Sisrilnardi (2024) 'Benang Kusut Keterpilihan: Ketika Budaya, Modal Sosial, dan Oligarki Membentuk Takdir Politik Perempuan (Studi Darsia Iwan, Pasangkayu 2024)', *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(3), pp. 69–82.
- Pellicer, M. *et al.* (2022) 'Clientelism from the Client's Perspective: A Meta-Analysis of Ethnographic Literature', *Perspectives on Politics*, 20(3), pp. 931–947. Available at: <https://doi.org/10.1017/S153759272000420X>.
- rahmayanti, sri, Pageno, I. and Pradana, A. (2025) 'PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2024 DI DESA LENDE KABUPATEN DONGGALA', *Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(3), pp. 83–94.
- Renaldi, Hartawan and Pradana, A. (2025) 'Perilaku Pemilih Pemilu Legislatif 2024 di Kecamatan Sojol Utara', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), pp. 74–84.
- Rohmah, N.S., Rahayu, S.D. and Millata, C.I. (2024) 'BIAYA POLITIK TINGGI: OLIGARKI, DINASTI POLITIK, DAN KORUPSI', *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 50(1), pp. 45–59.
- Setiawan, I. (2022) 'PATRONASE DAN KLIENTALISME POLITIK (Studi Pada Masyarakat Daerah Pemilihan I, Kabupaten Bangka di Pemilihan Legislatif 2019)', *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), pp. 1255–1262.
- Sufianto, D., Subagyo, A. and Kurnia, D. (2018) 'POLA HUBUNGAN PATRONASE PADA BIROKRASI PEMERINTAHAN KOTA CIMAHI', *Jurnal Caraka Prabu*, 1(01), pp. 1–21. Available at: <https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.49>.
- Yusuf, A. *et al.* (2024) 'POLITIK UANG DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN', *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), pp. 104–108. Available at: <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5342>.